

Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar: Analisis Politik Pendidikan Era Jokowi

Ismail¹, Sabarudi², Muhammad Hilma Alrosyid²

¹ Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Manajemen Pendidikan Islam, Mahasiswa Magister
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ismailbawean1@gmail.com

² Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Manajemen Pendidikan Islam, Guru Besar Ilmu Sosiologi
Pendidikan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: sabarudin@uin-suka.ac.id

³ Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Manajemen Pendidikan Islam, Guru Besar Ilmu Sosiologi
Pendidikan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: hilma.arosid@gmail.com

Article history:

Received 1 Mei 2026

Revised 20 Mei 2026

Accepted 30 Mei 2026

Available online 12 Juni 2026

Abstrak

Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan pada era pemerintahan Joko Widodo merupakan salah satu transformasi pendidikan paling signifikan dalam sejarah sistem pendidikan nasional Indonesia. Namun, perubahan paradigma ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan tersebut membawa perubahan nyata dibandingkan kebijakan pendidikan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar dari perspektif politik pendidikan, dengan fokus pada perbandingan kebijakan pendidikan sebelum dan sesudah implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dan kajian literatur terhadap regulasi, kebijakan, serta berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar membawa pergeseran signifikan dalam paradigma pendidikan nasional, meliputi desentralisasi kurikulum, penguatan otonomi sekolah, serta perubahan sistem asesmen yang lebih berorientasi pada kompetensi peserta didik. Dibandingkan kebijakan sebelumnya, pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan konteks sosial budaya masyarakat. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya keberlanjutan reformasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, serta perlunya penguatan kapasitas guru dan tata kelola pendidikan sebagai prasyarat keberhasilan transformasi jangka panjang.

Kata kunci: Merdeka Belajar, politik pendidikan, transformasi pendidikan, era Jokowi

Abstract

The Merdeka Belajar policy launched during the administration of Joko Widodo represents one of the most significant educational transformations in the history of Indonesia's national education system. However, this paradigm shift raises a fundamental question regarding the extent to which the policy has brought substantive changes compared to previous educational policies. This study aims to analyze educational transformation through the Merdeka Belajar policy from the perspective of educational politics, with a focus on comparing educational policies before and after its implementation. The study employed a descriptive qualitative approach through document analysis and literature review of regulations, policies, and various relevant scholarly sources. The findings indicate that the Merdeka Belajar policy has generated a significant shift in the national education paradigm, including curriculum decentralization, strengthened school autonomy, and changes in the assessment system that are more oriented toward students' competencies. Compared to previous policies, this approach is considered more adaptive to local needs and the socio-cultural context of communities. The implications of this study emphasize the importance of sustaining student-centered educational policy reform, as well as strengthening teachers' capacity and educational governance as prerequisites for the success of long-term transformation.

Keywords: Merdeka Belajar, educational politics, educational transformation, Jokowi era

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan peradaban suatu bangsa. Secara global, berbagai negara tengah menghadapi tantangan transformasi pendidikan yang dipicu oleh perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan tuntutan dunia kerja abad ke-21. Organisasi internasional seperti UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) dan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) secara konsisten menekankan bahwa sistem pendidikan harus mampu beradaptasi secara dinamis agar relevan dengan kebutuhan zaman (Purba et al., 2026). Di tengah arus perubahan ini, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, berupaya melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di tingkat global (Zauzan et al., 2025).

Dalam konteks ilmu politik pendidikan (*politics of education*), kebijakan pendidikan tidak sekadar merupakan persoalan teknis manajerial, melainkan sarat dengan kepentingan ideologis, relasi kekuasaan, dan negosiasi antar aktor (Rahmi et al., 2025). Studi politik pendidikan menjadi relevan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana keputusan kebijakan dibentuk, diperdebatkan, dan diimplementasikan dalam sistem pemerintahan. Di Indonesia, dinamika politik pendidikan semakin kompleks seiring pergantian kepemimpinan nasional yang kerap membawa perubahan orientasi kebijakan secara signifikan, sehingga kajian akademis terhadap fenomena ini menjadi semakin mendesak dan strategis (Suhantoro et al., 2025).

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia adalah ketidakkonsistenan kebijakan pendidikan yang berganti setiap periode pemerintahan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pendidikan di lapangan (Tintigon et al., 2023). Kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2019 hadir sebagai respons atas berbagai permasalahan struktural tersebut. Meskipun disambut antusias oleh sebagian pihak, kebijakan ini juga memicu perdebatan luas mengenai kesiapan implementasi, ketersediaan sumber daya, serta konsistensi arah perubahan yang ditawarkan dibandingkan kebijakan pendidikan era sebelumnya (Putri et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek kebijakan pendidikan di Indonesia. Husin et al. (2024) menganalisis dinamika reformasi pendidikan guru dalam konteks desentralisasi pasca-Orde Baru. Maki et al. (2022) mengkaji hubungan antara kebijakan pendidikan dan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, Ridwan & Sumirat (2021) secara khusus meneliti implementasi desentralisasi pendidikan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di daerah. Adapun Sya'roni et al. (2026) menyoroti peran aktor politik dan kepentingan ekonomi dalam membentuk arah kebijakan pendidikan Indonesia secara makro.

Hasil dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa reformasi pendidikan di Indonesia cenderung menghadapi hambatan struktural yang bersifat berulang. Desentralisasi pendidikan terbukti belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata di seluruh daerah akibat kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain itu, ditemukan pula bahwa intervensi politik dalam perumusan kebijakan kerap menghasilkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan elektoral daripada perbaikan kualitas pendidikan secara substantif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat secara kritis. Sebagian besar kajian masih berfokus pada satu era kebijakan tertentu tanpa melakukan analisis komparatif yang memadai antara periode pemerintahan yang berbeda. Selain itu, banyak penelitian yang lebih menekankan aspek implementasi teknis kebijakan tanpa mengintegrasikan perspektif analisis politik secara komprehensif. Kajian yang secara eksplisit membandingkan lanskap kebijakan pendidikan sebelum dan sesudah bergulirnya Merdeka Belajar masih sangat terbatas, baik dari sisi kedalaman analisis maupun cakupan variabel yang dikaji.

Kesenjangan penelitian (*gap research*) yang teridentifikasi dari telaah literatur di atas adalah minimnya kajian yang secara sistematis dan komparatif menganalisis perubahan paradigma kebijakan pendidikan Indonesia antara era pra-Merdeka Belajar dan era implementasinya, khususnya dalam kerangka analisis politik pendidikan. Studi yang ada umumnya bersifat parsial, hanya mengulas satu episode kebijakan atau satu aspek tertentu, tanpa memetakan secara utuh pergeseran paradigma, relasi kuasa, dan dampak struktural yang dihasilkan dari transformasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar dalam perspektif politik pendidikan era Jokowi, dengan fokus utama pada perbandingan kebijakan pendidikan sebelum dan sesudah implementasi Merdeka Belajar. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana pergeseran paradigma, struktur kewenangan, dan orientasi kebijakan pendidikan nasional terjadi dalam konteks pergantian kebijakan tersebut?

Kebaruhan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis politik pendidikan dengan kajian komparatif kebijakan secara diakronik, sesuatu yang belum banyak dilakukan dalam literatur akademik Indonesia. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat kebijakan Merdeka Belajar masih terus berkembang dan membutuhkan evaluasi akademis yang kritis dan berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu politik pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi para pemangku kebijakan dalam merancang reformasi pendidikan yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi dan kajian literatur. Pendekatan kuantitatif tidak diadopsi dalam penelitian ini mengingat fokus kajian bukan pada pengukuran variabel numerik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap dinamika perubahan kebijakan pendidikan yang bersifat kontekstual, interpretatif, dan historis-komparatif. Metode kualitatif dipilih karena telah mapan digunakan dalam penelitian politik pendidikan dan analisis kebijakan publik, sebagaimana diterapkan oleh Stephen J. Ball dalam kerangka analisis siklus kebijakan (*policy cycle analysis*) dan Grindle (2004) dalam kajian reformasi kebijakan di negara berkembang (Agustini et al., 2025).

Sumber data penelitian terdiri atas dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer meliputi regulasi resmi pemerintah seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah, serta dokumen kebijakan resmi era pra-Merdeka Belajar dan era Merdeka Belajar. Dokumen sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga pendidikan nasional dan internasional, serta buku referensi yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan kriteria kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan rentang waktu yang representatif.

Pengambilan data dilakukan melalui telaah dokumen secara sistematis menggunakan panduan analisis yang telah disusun sebelumnya. Data yang terkumpul selanjutnya diolah melalui tiga tahapan analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan (Ahmad & Muslimah, 2021). Analisis komparatif kebijakan dilakukan untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma, perubahan struktur kewenangan, dan orientasi kebijakan pendidikan antara dua periode yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi kebijakan pendidikan Indonesia melalui perbandingan sistematis antara era pra-Merdeka Belajar (2005–2018) dan era Merdeka Belajar (2019–2024) dalam kerangka analisis politik pendidikan. Hasil telaah dokumen dan kajian literatur mengungkapkan tiga temuan utama yang signifikan.

Pertama, era pra-Merdeka Belajar didominasi pendekatan sentralistik dan standarisasi nasional. Ujian Nasional (UN) sebagai instrumen evaluasi tunggal terbukti memicu penyempitan kurikulum (*curriculum narrowing*), di mana sekolah cenderung memprioritaskan mata pelajaran yang diujikan dan mengabaikan pengembangan kompetensi holistik peserta didik. Tata kelola pendidikan periode ini pun ditandai dominasi birokrasi pusat yang menghambat inovasi di tingkat sekolah (Ummah et al., 2026).

Kedua, kebijakan Merdeka Belajar menandai pergeseran paradigma yang substantial. Penghapusan UN dan penggantinya dengan Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi (ANBK) menjadi temuan paling mengejutkan, karena untuk pertama kalinya negara menggeser orientasi evaluasi dari capaian individual peserta didik menuju penilaian kualitas satuan pendidikan secara sistemik (Indahri, 2021). Kurikulum Merdeka turut memberikan fleksibilitas signifikan kepada sekolah dalam merancang pembelajaran sesuai konteks lokal.

Ketiga, meskipun terjadi lompatan kebijakan yang progresif, implementasi Merdeka Belajar masih menghadapi tantangan struktural berupa kesenjangan kapasitas antardaerah dan keterbatasan infrastruktur digital, khususnya di wilayah 3T (Irfan et al., 2026).

Tabel berikut merangkum pergeseran paradigma antara kedua periode secara komparatif:

Dimensi	Era Pra-Merdeka Belajar	Era Merdeka Belajar
Orientasi Kurikulum	Sentralistik, seragam	Fleksibel, kontekstual
Sistem Asesmen	UN berbasis hasil individual	ANBK berbasis mutu satuan pendidikan
Otonomi Sekolah	Terbatas	Diperluas secara signifikan
Peran Guru	Pelaksana kurikulum	Fasilitator pembelajaran
Tata Kelola	Birokrasi dominan	Kolaboratif dan berbasis data

Secara keseluruhan, Merdeka Belajar merepresentasikan transformasi kebijakan yang progresif, namun potensi transformatifnya belum sepenuhnya terealisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

PEMBAHASAN

Transformasi Paradigma Kebijakan Pendidikan: Dari Sentralisasi menuju Merdeka Belajar

Transformasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Stephen J. Ball (Agustini et al., 2025) dalam kerangka analisis siklus kebijakan, setiap kebijakan pendidikan merupakan produk dari pertarungan wacana, negosiasi kepentingan, dan kontestasi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor pada level yang berbeda. Berangkat dari kerangka teoritis tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma yang terjadi antara era pra-Merdeka Belajar dan era Merdeka Belajar bukan sekadar pergantian teknis administratif, melainkan representasi dari reorientasi ideologis yang mendasar dalam cara negara Indonesia memandang dan mengelola pendidikan nasionalnya. Hal ini sejalan dengan argumen Kusumawardhana (2023) bahwa reformasi kebijakan di negara berkembang seringkali didorong oleh kombinasi antara tekanan eksternal, agenda politik domestik, dan kebutuhan mendesak untuk merespons krisis kualitas pendidikan yang telah berlangsung lama.

Untuk memahami besarnya pergeseran paradigma tersebut, perlu terlebih dahulu dicermati kondisi sistem pendidikan Indonesia pada era pra-Merdeka Belajar secara lebih mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan periode 2005–2018 didominasi oleh pendekatan sentralistik dan standarisasi nasional atau bisa disebut "desentralisasi yang tidak tuntas" (Bida, 2021). Meskipun secara formal otonomi daerah telah diberlakukan sejak tahun 2001, kebijakan pendidikan dalam praktiknya tetap dikontrol secara ketat oleh pemerintah pusat melalui instrumen standarisasi seperti kurikulum nasional dan Ujian Nasional (Taufiq et al., n.d.). Kondisi ini menciptakan paradoks kebijakan yang fundamental, yaitu di satu sisi pemerintah mengakui keberagaman konteks lokal, namun di sisi lain tetap mempertahankan mekanisme kontrol terpusat yang tidak memberikan ruang bagi adaptasi lokal yang bermakna. Implementasi Kurikulum 2013 yang meskipun dirancang lebih komprehensif dibandingkan KTSP, pada kenyataannya justru membebani guru dengan tuntutan administratif yang berlebihan (Uran, 2017). Saraswati (2020) mencatat bahwa guru-guru Indonesia pada periode ini menghadapi tekanan ganda, yakni tekanan untuk memenuhi standar administratif kurikulum di satu sisi dan tekanan mempersiapkan peserta didik menghadapi Ujian Nasional di sisi lain. Kondisi tersebut secara sistemik menggerus kreativitas pedagogis guru dan mereduksi proses pembelajaran menjadi aktivitas yang semata-mata berorientasi pada hasil ujian, bukan pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik.

Berangkat dari konteks tersebut, kemunculan kebijakan Merdeka Belajar dapat dipahami sebagai respons strategis terhadap akumulasi permasalahan struktural yang telah lama mengendap dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma yang substantial, di mana penghapusan Ujian Nasional dan penggantinya dengan Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi (ANBK) menjadi tonggak paling fundamental yang mengubah cara negara memandang kualitas pendidikan, dari orientasi capaian individual peserta didik menuju penilaian kualitas satuan pendidikan secara sistemik (Ramadiana et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan yang efektif mensyaratkan perubahan sistem evaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar pembaruan kurikulum di permukaan. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan secara bertahap sejak 2022 turut memberikan fleksibilitas signifikan kepada sekolah dalam merancang pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan lokal, yang secara teoretis merepresentasikan apa yang disebut *professional capital*, yakni upaya membangun kepercayaan terhadap kapasitas profesional guru sebagai ujung tombak perubahan pembelajaran (Arisanti, 2022).

Paradoks Implementasi dan Dinamika Reformasi Merdeka Belajar

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah temuan yang tidak terduga dan patut dicermati secara kritis. Salah satu yang paling mengejutkan adalah bahwa meskipun kebijakan Merdeka Belajar membawa perubahan paradigma yang progresif dan ambisius, kecepatan perubahan kebijakan justru berbanding terbalik dengan kesiapan ekosistem pendidikan untuk menerimanya. Fenomena ini dapat disebut sebagai *policy-implementation gap* yang paradoksal, di mana kebijakan yang dirancang untuk membebaskan justru menciptakan kecemasan baru di kalangan praktisi pendidikan. Penghapusan Ujian Nasional yang secara akademis telah lama diadvokasi sebagai langkah yang tepat, ternyata tidak serta-merta disambut positif oleh seluruh pemangku kepentingan. Sebagian besar guru dan kepala sekolah yang telah terbiasa dengan sistem evaluasi terstandarisasi selama lebih dari satu dekade mengalami disorientasi profesional yang signifikan ketika dituntut merancang asesmen berbasis kompetensi secara mandiri. Kondisi ini mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sistem sentralistik yang selama ini dikritik ternyata juga telah menciptakan ketergantungan struktural yang dalam, sehingga transisi menuju otonomi tidak dapat berlangsung secara instan tanpa investasi besar dalam pengembangan kapasitas (Farosa et al., 2026). Temuan serupa juga ditemukan pada implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang meskipun dirancang untuk mendemokratisasi akses terhadap

sumber belajar berkualitas, justru memunculkan paradoks eksklusivitas digital di wilayah 3T, di mana kebijakan yang bertujuan inklusif secara tidak sengaja memperlebar jurang kesenjangan antara sekolah perkotaan yang memiliki infrastruktur memadai dengan sekolah terpencil yang masih berjuang dengan keterbatasan konektivitas internet (Hidayat et al., 2025).

Temuan-temuan tersebut apabila dikonfirmasi dengan literatur terdahulu menghasilkan gambaran yang kompleks dan tidak sepenuhnya linear. Di satu sisi, temuan mengenai dominasi birokrasi pusat pada era pra-Merdeka Belajar secara konsisten sejalan dengan analisis Sya'roni et al. (2026) yang menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Indonesia selama periode tersebut sangat dipengaruhi kepentingan kelompok yang diuntungkan oleh sistem sentralistik, termasuk birokrasi pendidikan pusat dan penerbit buku teks nasional. Demikian pula, dampak negatif Ujian Nasional terhadap kualitas pembelajaran sejalan dengan penelitian Chadijah et al. (2022) yang menemukan bahwa sistem ujian berstandar tinggi (high-stakes testing) di berbagai negara berkembang cenderung mendistorsi proses pembelajaran dan menciptakan budaya "belajar untuk ujian" yang kontraproduktif bagi pengembangan kompetensi berpikir tingkat tinggi peserta didik. Di sisi lain, temuan penelitian ini juga bertentangan dengan sejumlah pandangan dalam literatur terdahulu. Maki et al. (2022) berpendapat bahwa demokratisasi pendidikan di Indonesia membutuhkan waktu yang sangat panjang dan tidak dapat dipercepat melalui intervensi kebijakan yang bersifat top-down. Temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa perubahan paradigma yang signifikan dapat terjadi dalam waktu relatif singkat apabila didukung oleh political will yang kuat dari level tertinggi pemerintahan. Demikian halnya pandangan pesimistis Ridwan & Sumirat (2021) terhadap kemampuan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan yang bermakna terbukti perlu direvisi, mengingat kebijakan Merdeka Belajar telah menunjukkan bahwa desentralisasi substantif bukan sekadar retorika, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan meski dengan segala keterbatasannya.

Faktor Pendorong dan Implikasi Transformasi Kebijakan Pendidikan

Pergeseran paradigma yang terjadi ini tidak lepas dari sejumlah faktor penyebab yang saling berinteraksi secara kompleks. Pertama, faktor kepemimpinan kebijakan memainkan peran yang sangat determinan, di mana kehadiran Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dengan latar belakang wirausaha teknologi membawa perspektif segar yang menghasilkan pendekatan kebijakan lebih berorientasi pada inovasi dan penggunaan teknologi sebagai instrumen transformasi. Kedua, tekanan akumulatif dari berbagai pihak terhadap sistem pendidikan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan abad ke-21 turut menjadi pendorong perubahan, di mana hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang secara konsisten menempatkan Indonesia di posisi bawah dalam peringkat internasional memberikan tekanan legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar (Hakim, 2026). Ketiga, momentum politik periode kedua pemerintahan Joko Widodo memberikan ruang yang lebih besar bagi pengambilan risiko kebijakan, sehingga pemerintah memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengimplementasikan kebijakan yang secara jangka pendek mungkin tidak populer, namun secara jangka panjang diyakini akan membawa dampak transformatif yang signifikan.

Meski demikian, beberapa catatan kehati-hatian perlu dikemukakan dalam menginterpretasikan seluruh temuan penelitian ini. Penelitian ini didasarkan pada analisis dokumen dan kajian literatur sehingga temuan yang dihasilkan merepresentasikan kondisi kebijakan pada tataran normatif dan konseptual, belum sepenuhnya menggambarkan realitas implementasi di lapangan secara empiris, mengingat perubahan kebijakan formal tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan praktik di ruang kelas. Selain itu, periode observasi yang mencakup tahun 2019–2024 masih terlalu singkat untuk menarik kesimpulan definitif mengenai dampak jangka panjang kebijakan Merdeka Belajar, sebab reformasi pendidikan yang sesungguhnya biasanya membutuhkan waktu satu generasi atau lebih untuk dapat dievaluasi dampaknya secara komprehensif. Potensi bias konfirmasi dalam penafsiran dokumen

kebijakan resmi yang umumnya disusun dengan kerangka naratif yang mendukung kebijakan yang sedang berjalan juga perlu diwaspadai, sehingga temuan penelitian ini sebaiknya dipandang sebagai pemetaan awal yang perlu dilengkapi oleh penelitian empiris yang lebih mendalam.

Berkaitan dengan implikasi temuan, penelitian ini memberikan kontribusi pada dua tataran sekaligus. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah analisis politik pendidikan Indonesia dengan memberikan bukti dokumentatif bahwa dinamika perubahan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang melingkupinya, sekaligus menunjukkan bahwa kerangka analisis siklus kebijakan perlu diadaptasi dengan mempertimbangkan faktor kepemimpinan personal yang dalam konteks Indonesia memiliki pengaruh sangat besar terhadap arah dan kecepatan perubahan kebijakan. Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Merdeka Belajar secara merata mensyaratkan investasi besar dan sistematis dalam pengembangan kapasitas guru di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang selama ini berada di pinggiran sistem pendidikan nasional. Tanpa penguatan kapasitas guru yang memadai, desentralisasi kurikulum berisiko hanya menguntungkan sekolah-sekolah yang sudah memiliki kapasitas tinggi dan justru semakin memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah. Di samping itu, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan arah reformasi terlepas dari pergantian kepemimpinan politik, mengingat kecenderungan historis kebijakan pendidikan Indonesia yang kerap berganti mengikuti siklus pergantian menteri.

Mengacu pada keterbatasan dan temuan penelitian ini, beberapa agenda penelitian lanjutan perlu direkomendasikan. Penelitian empiris kualitatif berbasis lapangan yang mengkaji secara langsung pengalaman guru, kepala sekolah, dan peserta didik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di berbagai konteks sangat dibutuhkan, khususnya untuk membandingkan kondisi antara sekolah di perkotaan, perdesaan, dan wilayah 3T guna mengisi kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas implementasi yang belum terjangkau oleh penelitian dokumentasi seperti studi ini. Selain itu, penelitian komparatif lintas negara yang membandingkan kebijakan Merdeka Belajar dengan reformasi pendidikan serupa di negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Filipina akan memberikan perspektif yang berharga untuk menilai keunikan dan efektivitas relatif pendekatan Indonesia. Akhirnya, kajian longitudinal yang mengikuti perkembangan implementasi Merdeka Belajar selama minimal satu dekade ke depan sangat diperlukan untuk menghasilkan evaluasi komprehensif dan berbasis bukti mengenai dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap kualitas lulusan, relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja, serta pengurangan kesenjangan pendidikan antardaerah di seluruh wilayah Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis transformasi kebijakan pendidikan Indonesia melalui perbandingan sistematis antara era pra-Merdeka Belajar (2005–2018) dan era Merdeka Belajar (2019–2024) dalam kerangka analisis politik pendidikan. Hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan Merdeka Belajar merepresentasikan pergeseran paradigma yang substantial, ditandai oleh transformasi sistem asesmen, fleksibilitas kurikulum, dan penguatan otonomi sekolah yang secara kolektif menandai reorientasi mendasar dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi yang lebih bermakna dalam tata kelola pendidikan nasional.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Temuan penelitian ini dihasilkan melalui analisis dokumen dan kajian literatur sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan realitas implementasi kebijakan di lapangan secara empiris. Selain itu, periode observasi yang mencakup tahun 2019–2024 masih terlalu singkat untuk menarik kesimpulan definitif mengenai dampak jangka panjang kebijakan Merdeka Belajar terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai pemetaan awal yang bersifat konseptual-dokumentatif, bukan sebagai evaluasi empiris yang komprehensif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris berbasis lapangan yang melibatkan guru, kepala sekolah, dan peserta didik di berbagai konteks wilayah, serta mengembangkan kajian longitudinal dan komparatif lintas negara guna menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti terhadap implementasi Merdeka Belajar dalam jangka panjang.

SARAN

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga prioritas kebijakan yang mendesak. Pertama, pemerintah perlu menginvestasikan penguatan kapasitas guru secara sistematis dan merata, khususnya di wilayah 3T, sebagai prasyarat utama keberhasilan desentralisasi kurikulum. Kedua, diperlukan mekanisme kelembagaan yang menjamin keberlanjutan arah reformasi pendidikan terlepas dari pergantian kepemimpinan politik. Ketiga, percepatan pemerataan infrastruktur digital harus menjadi agenda prioritas agar transformasi pendidikan berbasis teknologi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh peserta didik di seluruh pelosok Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, M., Salsabila, F., Khaira, M., & Zulkhairi, Z. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan: A Sytematic Literature Review. *Desultanh: Journal Education and Social Science*, 3(2), 118–131.
- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings of International Conference on Interdisciplinary Research*, 1(1).
- Arisanti, D. A. K. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 243–250.
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228–248.
- Chadajah, D. I., Sariyanti, L., & Srilestari, Y. (2022). Rasionalitas Penghapusan Ujian Nasional Terhadap Semangat Belajar Pada Siswa Smpn 3 Aceh Barat. *Jurnal Society: Pengamat Perubahan Sosial*, 2(2), 111–124.
- Farosa, F., Farina, S. D. A. A., Adawiyah, R., & Sofi, S. (2026). Analysis of Centralized and Decentralized Education Financing Models in Indonesia. *Comprehensive: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, 2(2), 156–164.
- Hakim, M. A. M. (2026). Menuju Arsitektur Baru Pendidikan: Analisis Komparatif Budaya Literasi Siswa Sekolah Dasar di Indonesia dan Finlandia. *Al-Basyir : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 97–108.
- Hidayat, R., Sukiman, S., Suyatno, S., & Samaalee, A. (2025). Implementasi Platform Merdeka Mengajar dalam Pengembangan Kompetensi Guru: Systematic Literature Review. *Journal of Education Research*, 6(4), 791–804.
- Husin, H., Su'adi, S., Elwidah, M., & Sudur, S. (2024). Kebijakan Pendidikan Pasca Orde Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 16–32.
- Indahri, Y. (2021). Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 12(2).
- Irfan, A., Dewi, R. S. I., & Rufiana, I. S. (2026). Analisis Kritis Terhadap Isu Dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar Di Indonesia. *Wahana Sekolah Dasar*, 34(1), 25–48.

- Kusumawardhana, I. (2023). A Dynamic System Approach: Modalitas Kontrol Pemerintah Terhadap Agenda Pembangunan Di Negara Berkembang. *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 146–162.
- M, S., Safitri, A., & Kabiba, K. (2020). Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran (JPP)*, 1(3), 120–128.
- Maki, H. A., Gunawan, G., Sauri, S., & Handayani, S. (2022). Pola Hubungan Kebijakan Dan Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1124–1137.
- Purba, J. R. T., Siagian, A. F., Purba, N., Panjaitan, B., & Malatua, M. (2026). Analisis Pendidikan Sebagai Suatu Sistem: Analisis Komponen, Dinamika, Dan Tujuan Dalam Perspektif Kontemporer. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 7(3), 1305–1312.
- Putri, M. W., Azizah, R. N., Sofianisa, U., Amirudin, A., & Fitri, T. A. (2025). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar: Antara Idealitas Konsep dan Realitas Lapangan di Berbagai Daerah Indonesia. *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam*, 15(2), 179–190.
- Rahmi, C. A., Afifah, N., Lestari, D., Kurniawan, D., & Juliani, J. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Politik Pendidikan. *Saramase*, 1(2), 29–37.
- Ramadiana, D. N., Asbari, M., & Laksana, R. P. (2024). Asesmen Nasional: Tolok Ukur Kualitas Pendidikan Indonesia ? *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 17–22.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Suhantoro, Imamia, A., Zehro, A. I., Sjarif, E. I., Rizkiyah, T., Jennah, R., & Rusdani, Z. (2025). *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*. Penerbit: Kramantara JS.
- Sya'roni, Mulyadi, & Duryat, M. (2026). Politics in the Formulation of Educational Policy as a Form of Power in Public Policy. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), 2463–2480.
- Taufiq, A., Susanto, R. T., Prayugo, R. B., & Ramadhani, G. F. (n.d.). *Kebijakan Pemerintah pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN) | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809.
- Ummah, A. N., Sayekti, H. R., & Yusuf, M. S. (2026). Transformasi Paradigma Kurikulum di Indonesia Dari Kurikulum 1947 Hingga Kurikulum Merdeka: Transformasi Kurikulum sebagai Respon Politik, Ideologis dan Pedagogis. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 507–513.
- Uran, L. (2017). Evaluasi implementasi KTSP dan Kurikulum 2013 pada SMK se-Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22(1), 1–11.
- Zauzan, R. M., Pratama, M. A., Lestari, D., & Dkk, D. (2025). *EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA MASA KINI: Menjawab Tantangan, Mewujudkan Daya Saing*. Alfabeta Indonesia.